

Volume 16	No. 2, November 2020	Halaman 245-258
-----------	----------------------	-----------------

**NEGOSIASI IDEOLOGI PUISI “KAU INI BAGAIMANA ATAU AKU HARUS BAGAIMANA” KARYA K.H. A. MUSTOFA BISRI:
KAJIAN HEGEMONI GRAMSCI
(The Ideological Negotiation of The Poet “Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana” Works K.H. A. Mustofa Bisri: Gramsci Hegemony Study)**

**Heny Anggreini, Muharrina Harahap, & Jakaria
Magister Ilmu Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada,
Jalan Sosio Humaniora, Bulaksumur, Depok, Catur Tunggal, Yogyakarta 55281,
Indonesia, Telepon: (0274) 513096
Pos-el: anggreiniheny@yahoo.com**

(Diterima: 2 April 2020; Direvisi: 26 Juni 2020; Disetujui: 2 November 2020)

Abstract

The poem “Kau ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana” is a form of struggle by the subordinate group to the dominant (authority holder) that suppresses freedom (wealth) despite the status of independence as a nation. The authority seems to give freedom however at the same time controlling the people for absolute obedience. In that circumstance, the intellectuals (poets) do act of resistance to escape from the oppression by the authoritarian. This research aims to see ideology formation and negotiation of the poem to explain the contestation and negotiation by the poet, as a reflection of the intellectuals (college students, poets, researchers) to stimulate a shifting point of view through literature. This research applies a descriptive qualitative method focusing on concepts of hegemony by Gramsci. The result shows that the character of “Aku” represents the subordinates and as a counter of hegemony (conveyor of counter-hegemony) against militarism by the dominant. Gus Mus tried to negotiate religious nationalist-humanism ideology to people through his poem arguing that people need religious ideology to form thoughts and behavior. Nonetheless, Gus Mus implicitly negotiated Pancasila as a state ideology to be re-embraced and shattered the authoritarian militarism because Pancasila is the foundation of Indonesia.
Keywords: counter-hegemony, domination, subordinate

Abstrak

Puisi “Kau ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana” adalah bentuk perlawanan kelompok subordinat terhadap kelompok dominan (penguasa) yang melakukan penindasan dan tidak memberikan kemerdekaan (kesejahteraan) walau rakyat telah merdeka. Kelompok penguasa memberikan kebebasan kepada rakyat, tetapi juga mengekang rakyat untuk tunduk kepada perintah penguasa. Oleh karena itu, kaum intelektual (penyair) melakukan resistensi untuk keluar dari ketertindasan yang dialami oleh kaum subordinat karena sikap otoriter penguasa. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui formasi dan negosiasi ideologi puisi sehingga terjelaskan bahwa kontestasi dan negosiasi ideologi yang dilakukan penyair dalam puisinya sebagai bentuk keinginan kaum intelektual (mahasiswa, penyair, dan peneliti) untuk menjadikan rakyat kritis dan bermoral dengan memengaruhi pola pikir (cara pandang) dan pola perilakunya melalui karya sastra. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada analisis isi dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci. Hasil penelitian ini adalah tokoh “aku” adalah kelompok subordinat yang juga sebagai konter hegemonik (pembawa hegemoni tandingan) atas militerisme yang dipegang oleh kelompok dominan. Gus Mus mencoba untuk menegosiasikan nasionalisme-humanis yang religius kepada rakyat melalui puisinya karena manusia memerlukan ideologi religius dalam membentuk pola pikir dan perilakunya. Namun di samping itu, Gus Mus secara tersirat menegosiasikan ideologi Pancasila yang harus dipegang kembali oleh

negara dan mulai meluluhkan militerisme yang otoriter karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia.

Kata-kata kunci: counter hegemonik, dominasi, subordinat

DOI: 10.26499/jk.v16i2.2329

How to cite: Anggreini, H., Harahap, M., Jakaria (2020). *Negosiasi ideologi puisi “Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana” karya K.H. A. Mustofa Bisri: Kajian hegemoni Gramsci. Kandai, 16(2), 245-258 (DOI: 10.26499/jk.v16i2.2329)*

PENDAHULUAN

Puisi “Kau ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana” ditulis oleh K.H. A. Mustofa Bisri atau yang dikenal dengan Gus Mus pada tahun 1987. Puisi tersebut lahir pada masa Orde Baru, yaitu pada pemerintahan Presiden Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia untuk keempat kalinya.

Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia untuk pertama kali pada 12 Maret 1968. Masa pemerintahannya disebut dengan Orde Baru dengan segala tindakan yang dilakukannya untuk negara dan rakyat Republik Indonesia, seperti membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan—mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dalam hal pembebasan sumber daya di militer (Alejandro, 2007). Soeharto memperoleh kepercayaan dan dukungan dari rakyat dan para pejabat pemerintah untuk dipilih menjadi presiden sampai tahun 1998. Akan tetapi, selama masa pemerintahannya, Soeharto bertindak otoriter dan berakibat pada rakyat menjadi tertindas. Rakyat harus tunduk dan patuh terhadap aturan dan sistem pemerintah, bahkan kegiatan pers dibatasi dengan tidak diperbolehkan mengkritisi kinerja pemerintah (*Orde Baru, Masa Kelam Indonesia*, 2018).

Sistem pemerintahan yang otoriter dijalankan sebagai strategi pemerintah untuk menutupi kelemahan dan kebobrokan sistem pada masa itu. Seperti yang terjadi pada tahun 1970, presiden Soeharto melarang protes para

pelajar setelah demonstrasi yang meluas untuk melawan korupsi, sebab pada masa pemerintahan presiden Soeharto, tindak korupsi merajai (Alejandro, 2007).

Ketidakadilan, keterindasan, dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat selama bertahun-tahun pada masa Orde Baru menjadi sorotan kaum intelektual, salah satunya penyair/pengarang untuk mengkritisi—melakukan perlawanan karena jengah melihat ketidakadilan dan penderitaan rakyat serta terhadap kesenjangan dan ketidaksesuain yang terjadi.

Perlawanan yang dilakukan oleh kaum penyair/pengarang tidak dengan kekerasan dan kekuasaan. Akan tetapi, perlawanan dilakukan dengan mencekoki, mengontestasikan, dan menegosiasikan ideologi-ideologi yang dapat melawan ideologi besar dan berkuasa melalui tulisan atau karya sastra.

Perlawanan yang dilakukan oleh penyair/pengarang tersebut—tanpa disadari—diterima dan memengaruhi pandangan dan kultur rakyat sehingga rakyat yang mengalami ketertindasan mulai sadar harus melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Kondisi yang demikian merupakan bentuk hegemoni tandingan yang dilakukan penyair/pengarang terhadap hegemoni negara selama masa Orde Baru.

Gus Mus mengontestasikan dan menegosiasikan ideologinya melalui karya sastra pada masa Orde Baru—masa terpuruknya rakyat Indonesia—ad dengan puisi “Kau Ini Bagaimana atau

Aku Harus Bagaimana” (Gus Mus *Respon Polemik Puisi Kau ini Bagaimana*, 2018). Puisi ini ditulis sebagai bentuk perlawanan karena hak-hak rakyat diambil dan rakyat terus mengalami penindasan. Puisi ini sebagai refleksi dari perlawanan kelas subordinat yang tertindas (buruh) terhadap kelas dominan (penguasa/pemerintah) yang ingin mengukuhkan kekuasaannya.

Pada puisi tersebut, Gus Mus menciptakan dua tokoh yang bertentangan, yaitu tokoh “aku” yang ditandingkan dengan tokoh “kau”. Tokoh “aku” mengontestasikan ideologinya untuk melakukan resistensi terhadap tokoh “kau” yang memegang ideologi besar. Akan tetapi, dalam perlawanan tersebut terdapat keambiguitas baik dari tokoh “aku” maupun tokoh “kau”. Bentuk ambiguitas itu terletak pada sikap penguasa (kelompok dominan) yang menyebut “merdeka”, tetapi rakyat (kelompok subordinat) masih terbelenggu dalam rantai kemiskinan dan ketertindasan.

Kelompok dominan mengonstruksi kelompok subordinat untuk menjadi rakyat yang sesuai dengan bentukan mereka—dengan menjadikan aspek-aspek kebudayaan seperti sosial, budaya, agama, dan politik sebagai tempat untuk memperkuat konstruksi dan mengukuhkan kekuasaan mereka. Sedangkan, ambiguitas tokoh “aku” terlihat pada kebingungan tokoh “aku” sebagai kaum subordinat dalam dan untuk berperilaku/bertindak. Artinya, penyair tidak dapat lepas dari konstruksi yang dibangun oleh kelompok penguasa, bahkan perlawanan yang dilakukan juga tidak lepas dari konstruksi-konstruksi tersebut.

Terlepas dari ambiguitas tokoh-tokoh tersebut, puisi karya Gus Mus ini digunakan sebagai alat untuk melawan sistem pemerintahan pada masa Orde Baru dengan sindiran dan negosiasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk negosiasi ideologi puisi “Kau ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana” dengan ideologi rakyat pada masa terciptanya puisi. Dengan menjawab persoalan tersebut, maka akan tercapai tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui negosiasi ideologi puisi sehingga akan jelas bahwa kontestasi dan negosiasi ideologi yang dilakukan penyair dalam puisinya sebagai bentuk keinginan kaum intelektual (mahasiswa, penyair, dan peneliti) untuk menjadikan rakyat kritis dan bermoral dengan mempengaruhi pola pikir atau cara pandang dan pola perilakunya melalui karya sastra.

Pada penelitian ini, peneliti menemukan penelitian terdahulu yang mengkaji puisi “Kau ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana” karya Gus Mus, yaitu dilakukan oleh Wahyuni (2016). Akan tetapi, puisi ini tidak dikaji menggunakan perspektif hegemoni Gramsci melainkan menggunakan teori *impression management* oleh Goffman.

Peneliti belum menemukan sebuah penelitian yang mengkaji puisi “Kau ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana” karya Gus Mus dengan menggunakan objek formal hegemoni Gramsci. Akan tetapi, peneliti menemukan beberapa penelitian yang menggunakan teori hegemoni Gramsci, seperti Astuti (2014), Hatmoko dkk. (2014), Falah (2018), Falah (2019), dan Anggreini (2019). Peneliti hanya memaparkan penelitian terdahulu yang terbit pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Hal ini dilakukan untuk memfokuskan penelitian ini.

Penelitian Wahyuni (2016) terhadap puisi “Kau ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana” karya Gus Mus menggunakan teori *impression management* Goffman adalah untuk

memperoleh penjelasan objektif tentang strategi pencitraan diri yang harmonis dalam puisi yang dikaji dari aspek bentuk linguistik, pendefinisian situasi, dan perubahan skrip.

Teori *impression management* Goffman memiliki pandangan bahwa tindakan sosial merupakan manifestasi dari struktur sosial. Goffman melihat bahwa rakyat tertata melalui *multiplicity of human interaction*. Seseorang atau rakyat akan menciptakan kesan kepada orang lain atau rakyat lain untuk menunjukkan citra diri yang dimilikinya. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni menggunakan metode kualitatif dengan rancangan interaksionisme simbolik. Hasil penelitian yang dilakukan Wahyuni adalah 1) bentuk linguistik digunakan penutur untuk mengkonstruksi citra diri yang santun, toleran, mau diatur, dan tanggung jawab untuk menghindari konflik dengan pemerintah; 2) pendefinisian situasi yang digunakan penutur untuk menciptakan citra diri yang diterima rakyat sebagai upaya untuk mendelegitimasi kekuatan pemerintah secara harmonis; dan 3) perubahan skrip dilakukan penutur untuk membentuk citra diri yang realistis dengan bertutur menggunakan skrip sastrawan.

Selanjutnya, penelitian Anggreini (2019) yang mengkaji cerpen “Sarman” karya Seno Gumira Ajidarma. Anggreini mengangkat persoalan bahwa karya sastra sebagai tempat kaum intelektual (penyair/pengarang) untuk mengontestasikan dan menegosiasikan ideologi-ideologinya sebagai upaya perlawanan terhadap kaum dominan. Tujuan penelitian yang dilakukan Anggreini adalah untuk menjelaskan tentang ideologi-ideologi yang berkembang di rakyat, termasuk ideologi dominan. Ideologi tersebut berkaitan dengan pola pikir dan pola perilaku rakyat dalam karya sastra. Metode yang

digunakan adalah deskriptif kualitatif yang berfokus pada analisis isi dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan Seno Gumira Ajidarma mengkritisi sebuah ideologi yang berkuasa di Indonesia, yaitu ideologi kapitalisme melalui tokoh Sarman. Seno Gumira Ajidarma menegosiasikan ideologi sosialis dan humanis kepada kapitalisme. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjadikan kapitalisme menjadi ideologi yang lebih berkemanusiaan dan bersosial kerakyatan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Falah (2018) terhadap novel *Ketika Cinta Bertasbih* karya Habiburrahman el Shirazy. Masalah yang dipersoalkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Falah adalah sebuah karya sastra berisi misi, pesan, bahkan ideologi pengarang yang disampaikan kepada pembaca. Misi, pesan, dan ideologi pengarang tersebut disampaikan melalui tokoh-tokoh yang ada dalam karya sastra. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan bentuk hegemoni ideologi dalam novel *Ketika Cinta Bertasbih*. Metode penelitian yang digunakan oleh Falah adalah deskriptif analisis dengan pendekatan hegemoni Gramsci. Hasil dari penelitian tersebut adalah Habiburrahman el Shirazy mengontestasikan ideologi keagamaan melalui tokoh-tokoh dalam novelnya. Ideologi keagamaan tersebut dilaksanakan dalam menghadapi setiap persoalan hidup, seperti pendidikan dan percintaan (perjodohan).

Terakhir, penelitian Falah (2019) juga mengkaji sebuah cerpen berjudul “Makelar” karya Sri Lima R.N. menggunakan pendekatan hegemoni Gramsci. Masalah yang dipersoalkan dalam penelitian tersebut adalah adanya kepercayaan rakyat—yang tidak rasional dan tidak lazim. Ini menunjukkan

adanya hegemoni yang dilakukan oleh individu kepada rakyat untuk kepentingan tertentu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Falah adalah Sri Lima R.N. melalui cerpen “Makelar” menjelaskan bahwa ada hegemoni yang diterima dan dipercayai oleh rakyat bahwa “orang pintar” akan selalu memberikan pemikiran-pemikiran yang bijak, sehat, positif, dan keuntungan kepada mereka. Kepercayaan yang dikonstruksi tersebut adalah bentuk hegemoni yang dilakukan oleh tokoh Handoko sebagai makelar dan juga dihegemoni oleh Amir sebagai “orang pintar”. Hal tersebut terjadi karena adanya kepentingan dan kekuasaan yang ingin dicapai, berupa material. Cara yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut adalah dengan kekuasaan dan pengetahuan sehingga rakyat yang terhegemoni tidak menyadari bahwa mereka sedang dikuasai.

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu tersebut, penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kesamaan dengan tiga penelitian, yaitu pada objek formal. Sedangkan, satu penelitian lagi memiliki kesamaan pada objek material, yaitu puisi “Kau ini Bagaimana atau Aku harus Bagaimana” karya Gus Mus. Peneliti belum menemukan puisi “Kau ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana” karya Gus Mus dikaji menggunakan perspektif hegemoni Gramsci, maka penelitian ini layak untuk dilakukan.

LANDASAN TEORI

Berbeda dengan Marxis ortodoks yang memperkenalkan “dominasi kelas” yang berfokus pada struktur kehidupan, yaitu kelas atas dan kelas bawah. Struktur tersebut adalah struktur ekonomik yang memiliki kekuatan material bahwa pemilik modal (kelas atas atau kaum borjuis) selalu

mendominasi pekerja (kelas bawah, buruh). Gramsci beranggapan bahwa kekuatan material saling berkaitan dengan ideologi. Kekuatan material merupakan isi—berupa kebudayaan, baik kebudayaan adiluhung maupun kebudayaan populer—yang menjadikan ideologi bermakna dan memiliki kekuatan (Faruk, 2016). Ideologi yang hidup di masyarakat tidak lahir begitu saja, melainkan disebar, dipersuasi, dan diiradiasi. Ini diperkenalkan Gramsci sebagai hegemoni.

Gramsci tidak setuju dengan konsep Marxis mengenai “dominasi kelas”, yaitu monopoli negara yang cenderung pada kekerasan dan setiap permasalahan atau perselisihan yang terjadi dalam negara diselesaikan dengan menerima segala keputusan yang diberikan oleh kepala negara secara mutlak. Gramsci lebih menyukai konsep kesetujuan (Adamson, 1980 dan Faruk, 2016). Kekerasan adalah cara dominasi dengan penanaman kekuasaan dari kelas berkuasa kepada kelas tertindas dengan cara paksa—melibatkan aparat negara. Sedangkan, kesetujuan adalah cara hegemoni yang menanamkan kekuasaan, tetapi tetap menerima adanya kesepakatan dalam penerapan ideologi dan kultural secara historis yang dinegosiasikan antara kelompok-kelompok dominan dengan kelompok subordinat yang dikuasai.

Gramsci menjelaskan konsep hegemoni dalam dua hal, yaitu kesetujuan dan kesadaran kelas. Kesadaran kelas dipahami sebagai intelektual umum dan kesadaran moral-budaya (Adamson, 1980 dan Faruk, 2016). Negara (penguasa dan/atau pemerintah) yang kuat akan menjalankan sistem pemerintahannya dengan menghegemoni kaum subordinat (rakyat dan kaum intelektual). Negara melakukan hegemoni dengan menanamkan pandangan-pandangan

yang bermoral dan intelektual yang menentukan baik dan buruk, salah dan benar, boleh dan tidak boleh (Faruk, 2016). Hal tersebut diterima karena rakyat telah dikonstruksi pandangannya bahwa struktur sebuah negara, instansi, organisasi, atau kelompok telah tersusun secara hirarki, yaitu menempatkan kelas majikan (penguasa) sebagai kelas atas yang mendominasi kelas pekerja (buruh).

Gramsci melihat hal tersebut sebagai suatu yang tidak stabil dalam struktur sosial. Jadi, dia mencoba untuk melakukan hegemoni tandingan yang dilakukan oleh kaum intelektual atau “masyarakat sipil” yang disebutnya sebagai intelektual organik. Intelektual organik merupakan intelektual yang berusaha mencapai tujuannya dengan memengaruhi (menegosiasi dan mengkontestasi ideologi tertentu) dan mempertahankan pengaruhnya dalam masyarakat (Schwarzmantel, 2015). Gramsci menyebutkan bahwa intelektual organik adalah sastrawan-(penyair/pengarang, filsuf, atau artis). Menurutnya, intelektual organik harus seseorang yang tersirat dan berkaitan dengan dunia produksi, industri, dan sains, bahkan ia menyarankan bahwa intelektual adalah seorang yang praktis dan berpengalaman dalam merefleksikan berbagai masalah (Schwarzmantel, 2015).

Hegemoni tandingan yang dilakukan oleh intelektual organik adalah untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan kebudayaan. Jika kita mengenal kebudayaan tinggi atau adiluhung, ada kebudayaan populer yang diminati oleh masyarakat lebih luas (Faruk, 2016).

Kesadaran kritis atas ketidakadilan sistem yang hegemonik merupakan dasar penting bagi intelektual organik di dalam *civil society*. Karena bagi Gramsci, proses hegemoni terjadi jika *civil*

society—proletariat—mengikuti cara berpikir dan gaya hidup kelompok elit yang mendominasi dan mengeksploitasi mereka. Akibatnya, kehidupan mereka terhegemoni, baik dari segi moralitas maupun intelektual. Konsep Gramsci tentang hegemoni, negara, dan *civil society* merupakan pemikiran yang mampu menyadarkan setiap individu untuk berpikir kritis dalam melihat struktur dan sistem negara, bahkan lebih dari itu. Simon (2004) melihatnya sebagai gerakan kontra diskursus warga negara terhadap diskursus dominan yang tidak demokratis dan tidak berkeadilan.

Agar dapat mencapai hegemoni, ideologi harus disebar. Ideologi tersebar melalui bahasa, *common sense* (kebiasaan umum), dan folklor (Faruk, 2016) yang disebar oleh kelompok, lembaga, atau instansi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dan karya sastra sebagai salah satu media untuk menyebarkan ideologi.

Melalui karya sastra, pengarang menghadirkan diskursus hegemoni sebagai bentuk kontra diskursus dari hegemoni dominan. Sebagai salah satu diskursus hegemoni, karya sastra memiliki formasi ideologi. Formasi ideologi tidak hanya membahas ideologi yang terdapat dalam teks melainkan juga hubungan antara ideologi-ideologi—merupakan sistem besar yang memberikan orientasi kepada manusia yang bersifat kolektif dan berada di setiap sisi kehidupan manusia (Homba & Dawa, 2015).

Diskursus ideologi yang dihadirkan melalui karya sastra sebagai bentuk penegasian, kekuasaan bukanlah dominasi milik suatu kelas tertentu yang menguasai kelas lainnya, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis (Hatmoko dkk., 2014). Menurut Boccock, dalam Hatmoko dkk.

(2014), beberapa pokok pikiran yang penting berkaitan dengan konsep hegemoni, yaitu (1) dikatakan hegemoni jika kelompok yang mendominasi berhasil memengaruhi kelompok yang didominasi untuk menerima nilai-nilai moral, politik, dan budaya dari kelompok dominan; (2) hegemoni yang diterima sebagai sesuatu yang wajar mampu menyebar dan dipraktikkan; dan (3) terdapat upaya untuk terus memperjuangkan nilai dan ideologi oleh pihak dominan agar pihak yang didominasi diam dan taat kepada kelompok penguasa.

Hegemoni menjadikan kaum penguasa tampak harmonis dengan kaum subordinat. Kondisi struktur sosial yang mengalami kesenjangan, seperti kaum kaya (penguasa) mendominasi kaum miskin (buruh/pekerja), setelah dipoles dengan kultural, politis, dan ideologi-ideologi yang ditanamkan pada suatu negara, menjadikan keduanya tampak satu kesatuan yang rukun dan saling melengkapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sumber data puisi K.H. A. Mustofa Bisri yang berjudul “Kau ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengarah pada analisis isi (Udasmoro, 2012). Data penelitian ini adalah berupa kata, baris, ataupun bait dalam puisi tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1) Membaca data secara berulang; 2) mengklasifikasikan data; 3) menyeleksi data yang dinilai relevan dengan permasalahan, pertanyaan, dan tujuan penelitian; 4) melakukan analisis data; dan 5) membuat laporan penelitian. Data-data tersebut dianalisis menggunakan teori hegemoni Gramsci,

yaitu kepemimpinan yang bermoral dan berintelektual dengan adanya kesetujuan.

PEMBAHASAN

Puisi “Kau ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana” karya Gus Mus merupakan karya yang fenomenal pada masanya—Orde Baru. Kaum intelektual seperti mahasiswa, penyair, dan para aktivis selalu membacakan puisi tersebut saat berdemonstrasi sebagai bentuk perlawanan—dengan sindiran—karena gerah dengan sistem birokrasi yang keras dan sistem pemerintahan Soeharto yang otoriter. Rakyat ingin memperoleh hak-hak keadilan, kesejahteraan, dan kemerdekaan.

Puisi “Kau ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana” digunakan sebagai alat perlawanan karena berisi ideologi-ideologi yang pro terhadap rakyat—dengan menentang ideologi pemerintah. Puisi ini menyuarakan kondisi, hati, dan pikiran rakyat yang pada masa itu mengalami ketertindasan, ketidakadilan, dan kekerasan karena sistem birokrasi dan sistem pemerintah yang otoriter, yaitu sistem yang dibuat oleh penguasa untuk menjadi lebih berkuasa dan tetap berkuasa.

Formasi Ideologi Puisi “Kau ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana”

Puisi “Kau ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana” mengisahkan tentang tokoh “aku” (rakyat) sebagai kaum subordinat yang disetir oleh “kau” sebagai kaum dominan (pemerintah). “Aku” tidak diberikan kebebasan untuk bertindak dan berpikir, serta selalu dikontrol—di sinilah letak hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat. Rakyat tidak menyadari hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah karena kekuasaan dan

pandangan-pandangan (intelektual) yang bermoral telah ditanamkan melalui kebudayaan.

Terlihat ambiguitas penguasa (pemerintah), yaitu memberikan kebebasan, tetapi juga mengekang. Dapat dianalogikan, seperti burung yang tidak disangkarkan, tetapi kakinya tetap diikat. Kondisi ini terjadi karena rasa takut terjadi pemberontakan dan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat intelektual (pengarang/penyair, mahasiswa, dan peneliti) yang mulai bersuara untuk kebebasan untuk memperoleh hak sebagai manusia dalam mengeluarkan pendapat kritis terhadap kondisi sosial dan budaya yang berlangsung dan untuk memperoleh kemerdekaan yang sebenarnya (kesejahteraan).

Tokoh “aku” dimunculkan oleh penyair sebagai intelektual organik yang menentang dan membawa ideologi tandingan untuk disebarikan kepada rakyat. Ideologi-ideologi seperti humanisme, nasionalisme, religius, dan sosialisme dikontestasikan dan dinegosiasikan oleh penyair kepada rakyat pembaca melalui tokoh “aku” untuk melawan pemerintah (kaum dominan). Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemberontakan atas ketidakadilan dan ketertindasan yang dialami oleh rakyat. Tokoh “aku” termasuk sebagai konter hegemoni, yaitu bagian rakyat yang menandingi ideologi pemerintah, militerisme. Perhatikan tabel formasi ideologi berikut.

Tabel Formasi Ideologi Tokoh-tokoh dalam Puisi

Tokoh	Kelompok Tokoh	Kategori Tokoh	Formasi Ideologi	Ideologi Dominan
Aku	Subordinat	Intelektual organik	Religius Nasionalisme Sosialisme Humanisme	Nasionalisme- humanis
Kau	Dominan (penguasa)	Pemerintah	Militerisme Pancasila	Militerisme

Melihat tabel di atas, tokoh “aku” memiliki ideologi dominan, yaitu nasionalisme-humanis seperti kutipan puisi berikut.

Kau ini bagaimana/ Kau bilang aku merdeka/ Tapi kau memilihkan untukku segalanya.

Di samping nasionalisme-humanis sebagai ideologi dominan, terlihat adanya ideologi religius dan sosialisme. Ideologi religius terlihat pada kutipan bait berikut.

Kau ini bagaimana/ Kau suruh aku berfikir/ Aku berfikir kau tuduh aku kafir; Kau ini bagaiman/ Kau suruh aku taqwa/ Tapi khotbah keagamaanmu membuatku sakit jiwa; Kau bilang Tuhan sangat dekat/ Kau

sendiri memanggil-manggilnya dengan pengeras suara setiap saat.

Selanjutnya, sosialime terlihat pada kutipan berikut.

Kau bilang jangan banyak tingkah/ Aku diam saja kau tuduh aku apatis; Kau ini bagaimana/ Kau suruh aku toleran/ Aku toleran kau tuduh aku plin-plan.

Setiap baris puisi adalah bentuk perlawanan kepada kelompok dominan (penguasa). Tokoh “aku” sebagai intelektual organik juga berperan sebagai konter hegemoni yang menyebarkan atau menegosiasikan ideologi kepada penguasa. Penguasa (kelas dominan) yang pada puisi tersebut ditandai dengan

tokoh “kau” yang memiliki ideologi dominan, yaitu militerisme. Militerisme ini tergambar dari sikap tokoh “kau” yang selalu beroposisi dengan tokoh “aku”. Tokoh “kau” tidak memberikan kebebasan penuh kepada tokoh “aku” untuk berekspresi dan segala perbuatan harus selalu sesuai dengan perintah. Berikut ini penggalan bait puisinya.

Kau bilang kritiklah/ Aku kritik kau marah/ Kau bilang carikan alternatifnya/ Aku kasih alternative kau bilang jangan mendikte saja.

Di samping militerisme, terlihat adanya ideologi Pancasila seperti pada kutipan berikut.

Kau ini bagaimana/ Kau suruh aku toleran/ Aku toleran kau tuduh aku plin-plan; Kau bilang kau suka damai/ Kau ajak aku setiap hari bertikai.

Militerisme dianggap sebagai ideologi dominan karena terlihat pada setiap bait puisi, kelompok dominan (penguasa) memiliki otoritas yang sangat kuat terhadap rakyat—melakukan sesuatu berdasarkan perintah—yang setiap hal harus sesuai dengan persetujuan dari penguasa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, ideologi dominan puisi “Kau ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana” adalah ideologi nasionalisme-humanis. Ideologi ini berusaha untuk bernegosiasi dengan militerisme, yaitu ideologi yang otoriter. Ideologi ini menindas kehidupan rakyat. Rakyat menjadi terkekang dan tidak dapat melakukan hal berdasarkan pikirannya sendiri.

Identifikasi Historis-Kultural

Konflik dalam puisi merupakan kondisi yang terjadi pada masa Orde Baru, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pemerintahan pada

masa Soeharto dikenal sangat otoriter. Pada tahun 1974, sekitar dua belas surat kabar ditutup dan ratusan rakyat Indonesia, termasuk mahasiswa, ditangkap dan dipenjarakan. Peristiwa ini terjadi setelah beberapa bulan terjadinya peristiwa Malari pada 15 Januari 1974 (Alejandro, 2007). Kondisi tersebut dikarenakan dua badan intelijen yang dibentuk oleh Soeharto, yaitu Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Badan Koordinasi Inteligen Nasional (Bakin) dianggap mengancam keberadaannya (Alejandro, 2007).

Ketakutan Soeharto atas potensi ancaman dari para kaum intelektual mengharuskannya untuk mengeleminasi gerakan mahasiswa (pers kampus), yaitu dengan diberlakukannya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) pada tahun 1978. Kebijakan tersebut ditentang oleh para mahasiswa karena dengan berlakunya sistem tersebut, maka hubungan kegiatan mahasiswa dengan kampus dibatasi—segala kegiatan harus dengan persetujuan pemerintah sesuai dengan mekanisme kontrol dekanat dan rektorat (Alejandro, 2007).

Tidak hanya itu, hak pers untuk memberikan informasi kepada rakyat dicabut. Tragedi G30SPKI dijadikan alasan untuk membredel surat kabar—dengan pelabelan antek-antek PKI—termasuk pers. Sepanjang tahun 1980 sampai awal 1990-an, banyak penerbitan pers yang dicabut SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) dengan alasan mengganggu stabilitas nasional dan mengandung SARA (Gusmian, 2004).

Pemerintah membuat UU Pokok Pers Nomor 12 Tahun 1982 yang berisi tentang adanya restriksi atau peringatan mengenai isi pemberitaan (Alejandro, 2007). Artinya, segala informasi atau berita yang akan dipublikasikan kepada rakyat harus mendapatkan persetujuan

dari pemerintah, bahkan organisasi massa harus mendapatkan izin berdiri dari pemerintah—di dalamnya merupakan organisasi profesi buatan pemerintah sendiri.

Beberapa penerbitan pers yang mengalami pembredelan adalah harian sore, *Sinar Harapan* (1986), dibredel karena menulis tentang devaluasi rupiah dan menyoroti rencana pemerintah mencabut izin dari 44 monopoli impor. Menjelang pemilu 1983, beberapa penerbit kampus dibekukan, seperti *Gelora Mahasiswa* (UGM), *Derap Mahasiswa* (IKIP Yogyakarta), *Almamater* (IPB). Kasus serupa dialami majalah *Jakarta Jakarta* karena melaporkan tragedi Timor Timur—peristiwa tentara Indonesia yang menembaki demonstran di pemakaman Santa Cruz, Dili, tahun 1991—dan sebagainya.

Suara kritis rakyat diredam dengan teror dan kekerasan. Wakil rakyat ditundukkan dengan membangun budaya *patronase*—relasi timbal-balik antara patron (bos) dengan klien (anak buah). Logika kepatuhan diciptakan melalui politik perizinan, UU subversi, cekal, pencabutan SIUPP, dan seterusnya (Gusmian, 2004).

Masa Orde Baru (Orba) merupakan masa pemerintahan yang penuh dengan kekerasan. Setelah menghentikan segala informasi bagi rakyat—membredel surat kabar dan menghentikan kegiatan pers mahasiswa—pemerintah membuat strategi untuk memperkuat kekuasaannya, yaitu dengan mendominasi berbagai aspek. Orba melakukan konsolidasi kekuasaan yang sangat besar pada birokrasi pemerintahan. Pertama, mengontrol pemerintah dengan menyingkirkan orang-orang yang (dianggap) terasosiasi dengan PKI sebelum tahun 1966 melalui sistem pembatasan rekrutmen baru dan

mempercepat masa pensiun. Kedua, membuat pemerintah yang lebih setia dengan merekrut para perwira militer dalam birokrasi dengan gaya komando militer. Ketiga, mengaktifkan sistem birokrasi (Gusmian, 2004).

Kemudian, sistem birokrasi dijadikan sebagai lahan korupsi. Orba berhasil mewujudkan dirinya sebagai birokrasi yang kuat, tetapi tidak efisien dan profesional karena sistem yang dibangun untuk menghadirkan birokrasi penguasa daripada abdi rakyat. Birokrasi tersebut sengaja diciptakan untuk mengendalikan pembangunan sehingga birokrasi menjadi dominan dan memunculkan suatu sistem politik biokratisme—kekuasaan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan nasional terbatas pada lingkungan pegawai pemerintah. Sistem inilah yang kemudian menjadi kekuasaan personal, mudah terjebak pada karakter antipublik, nepotis, dan menjadi lahan subur bagi praktik korupsi dan manipulasi (Gusmian, 2004).

Rezim Orde Baru cenderung melakukan kekerasan terhadap rakyat yang dinilai “menggangu” dan mengancam sistem pemerintahan. Kekerasan yang terus terjadi melahirkan tekanan dan menjadikan anak bangsa terasing. Praktik otoriterisme Orba telah menjadikan rakyat menderita. Secara politik, rakyat selalu dikebiri melalui aturan-aturan yang merugikan rakyat. Secara ekonomi rakyat semakin sengsara melalui praktik ideologi pembangunan yang membuat si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin (Gusmian, 2004).

Keotoriteran pemerintah tersebut membuat gerah kaum intelektual sehingga melakukan berbagai upaya agar militerisme tersebut runtuh. Gus Mus adalah penyair—intelektual organik—yang menciptakan puisi “Kau ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana”

sebagai bentuk perlawanan dan ajakan kepada rakyat agar berpandangan dan berperilaku untuk membangun kesejahteraan dan memperoleh kebebasan diri dan bangsa. Puisi tersebut digunakan dan menjadi puisi wajib bagi rakyat dalam gerakan-gerakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan mahasiswa pada saat berdemonstrasi masa itu (*Gus Mus Respon Polemik Puisi Kau Ini Bagaimana*, 2018).

Ideologi Pengarang

Kondisi yang terjadi pada masa Orde Baru menyebabkan kaum intelektual menyuarakan ideologinya, termasuk Gus Mus dengan puisinya yang menjadi puisi wajib pada saat berdemonstrasi. Gus Mus dalam beberapa puisinya yang lain berbicara tentang kondisi sosial politik rakyat. Seperti puisi “Bagaimana” (*Gubug Maya Gus Mus*, 2016) yang memiliki nasionalisme. Puisi ini sebagai bentuk kritik terhadap kaum dominan yang menutup-nutupi keburukannya untuk melanggengkan kekuasaan.

Kemudian, puisi “Nyanyian Kebebasan atau Boleh Apa Saja” (*Gubug Maya Gus Mus*, 2016) yang juga mengkritisi kondisi sosial, politik, dan budaya rakyat. Digambarkan dalam puisi bahwa manusia bisa menjadi dan atau disebut apa saja, tidak peduli latar belakang yang dimiliki. Kehidupan sudah dibolak-balik, tidak lagi melihat dan menilai baik dan buruk. Keburukan dapat menjadi kebaikan dan sebaliknya. Puisi ini berisi ideologi nasionalis, humanis, sosialis, dan religius. Namun, ideologi dominan yang dimiliki adalah nasionalisme-humanis. Apabila ditilik lagi, puisi ini memiliki ideologi demokrasi dan Pancasila sebagai dasar negara. Ideologi demokrasi adalah ideologi yang dimiliki oleh pemilik kekuasaan yang menghegemoni rakyat.

Nasionalisme-humanis menjadi ideologi dominan dalam puisi-puisi Gus Mus, tetapi juga terdapat ideologi lain seperti religius, militerisme, dan sosialisme dalam karya puisinya yang lain. Ideologi militerisme dalam puisi-puisi Gus Mus adalah ideologi yang mendukung kekuasaan kelompok dominan yang menghegemoni rakyat. Sedangkan, ideologi religius dan sosialisme adalah ideologi rakyat yang berdampingan dengan nasionalisme-humanis. Gus Mus melalui tokoh-tokoh dalam puisinya menggambarkan ideologi yang dimiliki oleh rakyat Indonesia.

Berdasarkan puisi-puisi yang ditulis oleh Gus Mus, dapat disimpulkan bahwa Gus Mus memiliki ideologi nasionalisme-humanis yang religius. Ideologi religius lekat pada Gus Mus karena dia seorang ulama, pemimpin pondok Pesantren Roudlatut Thalibin, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Setiap puisi yang ditulisnya selalu bernapaskan Islam. Hal ini dapat mengidentifikasi Gus Mus sebagai bagian dari rakyat subordinat yang memperjuangkan rakyat kelas dua yang tertindas dan menginginkan rakyat memiliki ideologi religius serta nasionalisme-humanis. Hal ini dikarenakan suatu negara akan menjadi damai dan sejahtera apabila rakyat beragama (beriman).

Negosiasi Ideologi

Upaya atau tindakan yang dilakukan oleh tokoh “aku” merupakan suatu bentuk negosiasi ideologi. Negosiasi ideologi adalah suatu upaya atau tindakan untuk menyatukan ideologi suatu kelompok dengan ideologi yang berbeda sehingga terbentuk ideologi baru. Kemunculan ideologi baru bukan untuk menyingkirkan ideologi-ideologi lama yang telah tumbuh, tetapi

mentransformasi ideologi tersebut dengan menyusun unsur yang paling kuat untuk membentuk kekuatan kelompok yang besar (Astuti, 2014).

Tokoh “aku” melakukan negosiasi ideologi terhadap tokoh “kau” yang berideologi militerisme—ideologi dominan. Negosiasi tersebut terlihat dari setiap bait puisi yang mencoba untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok dominan (militerisme) yang menindas kehidupan rakyat. Pada puisi tersebut, pemerintah (penguasa) tidak memberikan kebebasan kepada rakyat. Rakyat mengalami belenggu. Setiap tindakan yang dilakukan rakyat haruslah mengikuti konstruksi yang dibuat oleh penguasa.

Puisi ini walaupun berideologi dominan nasionalisme-humanis, secara tersirat menegosiasikan ideologi Pancasila. Dinegosiasikannya ideologi Pancasila yang juga merupakan dasar negara Indonesia karena kaum intelektual menginginkan agar kaum dominan (pemerintah/penguasa) kembali kepada dasar negara yang terdiri atas lima sila: yang beragama, berkemanusiaan, yang nasionalis, mementingkan kesejahteraan rakyat, kepemimpinan yang adil, dan bukan bersikap otoriter (militerisme) yang mengekang dan menindas rakyat.

Gus Mus sebagai intelektual organik menegosiasikan ideologi nasionalisme-humanis karena kondisi rakyat yang ingin keluar dari ketertindasan. Namun, ideologi-ideologi yang dikontestasikan dan dinegosiasikan oleh penyair adalah bentuk penawaran kepada pembaca/rakyat. Diterima atau tidak, ideologi yang dinegosiasikan adalah upaya memberikan pandangan baru kepada rakyat untuk memperbaiki kehidupan, yaitu sikap/moral dan cara berpikir rakyat—pada akhirnya bertujuan untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

PENUTUP

Puisi “Kau ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana” karya K.H. A. Mustofa Bisri atau biasa dikenal Gus Mus adalah puisi yang dibuat untuk melawan militerisme yang otoriter kelompok dominan (penguasa). Militerisme itu menindas dan mengekang rakyat sehingga kaum intelektual (penyair) melawan dengan menegosiasikan ideologi-ideologi yang mendukung kesejahteraan dan kedamaian rakyat. Gus Mus memiliki ideologi dominan, yaitu nasionalisme-humanis di samping adanya ideologi religius dan sosialisme.

Tokoh “aku” yang diciptakan oleh Gus Mus adalah kelompok subordinat sebagai konter hegemoni atas militerisme yang dipegang oleh kelompok dominan. Gus Mus mencoba untuk menegosiasikan nasionalisme-humanis yang religius kepada rakyat melalui puisinya karena manusia memerlukan ideologi religius dalam membentuk pola pikir dan perilakunya. Namun di samping itu, Gus Mus secara tersirat menegosiasikan ideologi Pancasila yang harus dipegang kembali oleh negara karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Selain itu, militerisme yang otoriter harus diluluhkan karena ideologi tersebut tidak bisa sepenuhnya dianut dalam kehidupan rakyat yang memiliki berbagai suku dan ras.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamson, W. L. (1980). *Hegemony and revolution. Antonio Gramsci's political and cultural theory.* University of California Press.

- Alejandro, E. Y. G. (2007). *41 diktator zaman modern: Mengejar ambisi, menuai tragedi*. Jakarta: Visimedia.
- Anggreini, H. (2019). Formasi dan negosiasi ideologi: Kajian hegemoni Gramsci dalam cerpen "Sarman" karya Seno Gumira Ajidarma. *Totobuang*, 7(1), 157–169.
- Astuti, W. W. (2014). Formasi ideologi pada Cerpen "Dzikir Sebutir Peluru" karya Agus Noor: Analisis hegemoni Gramscian. *Medan Makna*, 12(2), 121–134.
- Gubug Maya Gus Mus, (2016). <http://gusmus.net/puisi/>
- Gus Mus Respon Polemik Puisi Kau Ini Bagaimana, (2018). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180411154325-20-290090/gus-mus-respons-polemik-puisi-kau-ini-bagaimana>
- Falah, F. (2018). Hegemoni ideologi dalam novel Ketika Cinta Bertasbih Karya Habiburrahman el Shirazy (Kajian hegemoni Gramsci). *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 13(4), 533–542.
- Falah, F. (2019). Kepercayaan dan hegemoni dalam cerpen "Makelar" karya Sri Lima R.N. (Kajian hegemoni Gramsci). *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 14(2), 136–146.
- Faruk. (2016). *Pengantar sosiologi sastra: dari strukturalisme genetik sampai postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gusmian, I. (2004). *Pantat Bangsaku: Melawan lupa di negeri para tersangka*. Yogyakarta: Galang Press.
- Hatmoko, M. D., Sumartini, & Mulyono. (2014). Hegemoni moral Nyai Kartareja terhadap Srintil dalam novel Jantera Bianglala karya Ahmad Tohari : Kajian hegemoni Gramsci. *Jurnal Sastra Indonesia*, 3(1), 1–9.
- Homba, C. V., & Dawa, W. (2015). Kontestasi ideologi dalam cerpen Boikot karya Putu Wijaya: Sebuah kajian menggunakan teori hegemoni Gramsci. *Sintesis*, 9(2), 83–92.
- Orde Baru, Masa Kelam Indonesia, (2018). <https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/11/27/105565/orde-baru-masa-kelam-indonesia>
- Schwarzmantel, J. (2015). *The Routledge guidebook to Gramsci's prison notebooks*. Routledge. <https://doi.org/10.5860/choice.193330>
- Simon, R. (2004). *Gagasan-gagasan politik Gramsci (Mansour Fakih, penerjemah)*. Yogyakarta: Insist.
- Udasmoro, W. (2012). *Buku ajar pengkajian sastra: Bagaimana meneliti sastra? Mencermati metodologi dasar dalam penelitian sastra*. Program Studi Sastra Perancis FIB UGM.

Wahyuni, L. (2016). Pembentukan citra diri dalam Puisi Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana karya KH. A. Mustofa Bisri. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 2(2), 187–194.